

Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial

Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Aidil Henry Akbar³
Gloria Tampubolon⁴ Zhafirah Ramadhani⁵ Bertaliana Br Ginting⁶ Priscilia⁷ Sisca
Simanullang⁸

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: kmuhammadibnu@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
aidilakbar530@gmail.com³ gloriatampubolon8@gmail.com⁴ akunzia14@gmail.com⁵
bertaginting35@gmail.com⁶ prisciliatampubolon72@gmail.com⁷
siscamanullang915@gmail.com⁸

Abstrak

Keadilan dalam pembagian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi hal yang sangat penting karena program ini dibuat sebagai alat oleh negara untuk memastikan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang setara dan adil, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masalah seperti penentuan sasaran yang kurang tepat, penggelapan data, praktik nepotisme, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan beasiswa belum sepenuhnya sampai kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah dari perspektif prinsip keadilan sosial Pancasila, meninjau kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta untuk mengevaluasi kemungkinan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hasil penilitan mengungkapkan bahwa walaupun program KIP Kuliah telah memberikan keuntungan signifikan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dalam proses seleksi, keakuratan dalam memverifikasi data, dan ketepatan dalam menentukan penerima. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di tingkat lokal.

Kata Kunci: Distribusi yang Adil, KIP Kuliah, Keadilan Sosial Pancasila

Abstract

Justice in the distribution of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) program is a crucial issue, as this program was established by the state as an instrument to ensure the constitutional right to equitable and fair access to higher education, in accordance with Article 31 of the 1945 Constitution and the fifth principle of Pancasila. However, in practice, various problems still occur, such as inaccurate targeting of beneficiaries, data manipulation, nepotism, delays in fund disbursement, and a lack of transparency and accountability, resulting in scholarships not fully reaching students who truly need them. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation involving five students from the Civic Education Study Program (PPKn) Cohort 2024, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Medan as research subjects. The purpose of this study is to analyze the process of determining KIP Kuliah scholarship recipients by the local government from the perspective of the social justice principles of Pancasila, to examine the alignment of recipient criteria with the principle of equal access to higher education, and to evaluate the potential for inequality and discrimination in the selection and distribution process based. The study revealed that while the KIP. Kuliah program has provided significant benefits for lower-income students, there are still shortcomings in terms of transparency in the selection process, accuracy in data verification, and accuracy in determining recipients. This indicates that the Pancasila principle of social justice has not been fully achieved in the implementation of the KIP Kuliah program at the local level.

Keywords: Fair Distribution, KIP Kuliah, Pancasila Social Justice



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) secara normatif dirancang sebagai instrumen negara untuk mewujudkan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KIP-K diorientasikan untuk membantu lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga miskin atau rentan miskin yang memiliki potensi akademik agar dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Program ini diharapkan menjadi alat pemutus mata rantai kemiskinan dan sekaligus pengejawantahan nilai keadilan sosial Pancasila dalam bidang pendidikan, di mana setiap warga negara seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa terhalang faktor ekonomi (Raihan & Fattah, n.d.). Masalah yang paling menonjol berkaitan dengan transparansi proses, mulai dari informasi kuota, kriteria penerima, hingga mekanisme penetapan nama-nama penerima yang sering kali tidak sepenuhnya terbuka bagi publik. Di samping itu, ketepatan sasaran masih dipertanyakan karena di beberapa kasus penerima tidak sepenuhnya merepresentasikan kelompok paling miskin atau paling rentan, sehingga tujuan pemerataan akses menjadi tidak optimal. Kendala lain adalah kelancaran pencairan dana yang kerap terlambat, sehingga manfaat beasiswa tidak segera dirasakan mahasiswa dan justru mengganggu keberlangsungan studi (Jannah et al., 2025a).

Pendistribusian KIP-K di berbagai perguruan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan dasar yang sama, persamaan kesempatan, dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Praktik manipulasi data, nepotisme, dan fenomena “miskin, dimiskinkan, dan diberi label miskin”, di mana mahasiswa yang relatif mampu justru lolos sebagai penerima KIP-K, sementara mahasiswa yang benar-benar miskin tersingkir karena proses seleksi dan survei lapangan yang tidak merata. Realitas ini menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme distribusi beasiswa lebih banyak berorientasi pada asas manfaat yang sempit, bukan asas hak, sehingga menimbulkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di kalangan mahasiswa penerima maupun calon penerima. Implementasi di berbagai perguruan tinggi masih menghadapi persoalan serius pada aspek transparansi, ketepatan sasaran, dan kelancaran pencairan dana, sehingga beasiswa belum sepenuhnya dinikmati oleh mahasiswa yang paling membutuhkan. Lemahnya proses verifikasi data, perbedaan standar penilaian antar kampus, dan keterbatasan kuota yang tidak selalu berpihak kepada mahasiswa dari keluarga sangat miskin menggambarkan bahwa efektivitas kebijakan sebagai alat pemerataan akses pendidikan tinggi masih jauh dari optimal. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana KIP-K Aspirasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar program bantuan yang prosedurnya sulit diakses dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Faktor pendukung adanya kerangka program KIP-K nasional yang sudah mapan, kesadaran sebagian anggota DPR untuk menyalurkan aspirasi di bidang pendidikan, dan kebutuhan nyata mahasiswa kurang mampu terhadap bantuan biaya kuliah. Namun faktor penghambat seperti birokrasi yang berbelit, informasi yang tidak merata, literasi kebijakan yang rendah di kalangan calon penerima, dan lemahnya sistem pengawasan membuat output kebijakan sering kali tidak sejalan dengan tujuan awal (Raihan & Fattah, n.d.). Tanpa dasar regulasi yang jelas misalnya dalam bentuk peraturan menteri atau peraturan turunan yang rinci muncul problem kepastian hukum, karena hak dan kewajiban para pihak (mahasiswa,

perguruan tinggi, anggota DPR, dan kementerian terkait) tidak diatur secara tegas. Ketiadaan norma prosedural yang baku juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas, karena mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan menjadi tidak terstruktur dengan baik. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi politisasi kebijakan menjadi terbuka lebar: rekomendasi beasiswa berpotensi dipersepsikan sebagai "hadiah politik" alih-alih hak sosial berdasarkan kebutuhan objektif mahasiswa (Jannah et al., 2025b).

Identifikasi Masalah: Adanya fenomena ketidaktepatan sasaran KIP-K yang tercermin dalam penerima dari keluarga tidak miskin sementara yang benar-benar rentan tersingkir, di kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Adanya fenomena keterlambatan pencairan dana KIP-K dan politisasi rekomendasi yang tercermin dalam birokrasi berbelit di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kehidupan sosial mahasiswa berpotensi memengaruhi pandangan mereka tentang hubungan antara sila kelima Pancasila dan fenomena "miskin, dimiskinkan, diberi label miskin. Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Prodi Fakultas Universitas Negeri Medan UNIMED sebagai subjek penelitian, sehingga kajian mengenai fenomena ketidaktepatan sasaran KIP-K, keterlambatan pencairan dana, serta pengaruh kehidupan sosial hanya akan dianalisis dalam lingkup kelompok mahasiswa tersebut. Penelitian ini tidak membahas mahasiswa dari stambuk atau program studi lain, serta tidak menyoroti isu distribusi KIP-K di luar ranah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Fokus penelitian juga terbatas pada keterkaitan antara keadilan sosial Pancasila dan literasi kebijakan sebagai upaya membentuk kesadaran mahasiswa dalam menolak politisasi KIP-K secara adil dan bertanggung jawab.

Beberapa Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah ditinjau dari prinsip keadilan Sosial Pancasila di kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial? Bagaimana kesesuaian kriteria penerima Beasiswa KIP Kuliah yang ditetapkan pemerintah daerah dengan prinsip pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menurut pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial? Bagaimana potensi terjadinya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi Beasiswa KIP Kuliah di tingkat daerah berdasarkan persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial? Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu: Untuk Menganalisis mekanisme penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah ditinjau dari prinsip keadilan Sosial Pancasila di kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Untuk Menganalisis kesesuaian kriteria penerima Beasiswa KIP Kuliah yang ditetapkan pemerintah daerah dengan prinsip pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menurut pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Untuk Menganalisis potensi terjadinya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi Beasiswa KIP Kuliah di tingkat daerah berdasarkan persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.

Penelitian yang Relevan

1. Jurnal Pertama "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat dalam Program Beasiswa Pena Bangsa" yang dimuat dalam Jurnal ini menguraikan bahwa pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak yatim dan dhuafa. Penelitian ini menjelaskan bahwa program beasiswa tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga pembinaan kepada penerima manfaat sehingga berdampak positif terhadap motivasi belajar dan keberlangsungan sekolah. Data penelitian menunjukkan bahwa program tersebut telah menjangkau 1.536 penerima dengan total bantuan sebesar Rp1.154.800.000 yang tersebar di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan distribusi, jumlah penerima, serta dampak nyata terhadap peningkatan akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu (Rusyadi et al., 2025).

2. Jurnal yang kedua ini “Penerapan Metode K-Means Clustering dan Simple Additive Weighting (SAW) dalam Penentuan Penerima Beasiswa” Jurnal ini membahas tentang penggunaan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan objektivitas dalam proses seleksi beasiswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penentuan penerima beasiswa yang seringkali belum terstruktur secara sistematis, sehingga diperlukan metode yang mampu mengolah data berdasarkan kriteria akademik dan ekonomi seperti IPK, UKT, serta presensi kehadiran mahasiswa. Dalam prosesnya, data mahasiswa terlebih dahulu melalui tahap pre-processing dengan transformasi nilai ke dalam rentang 0–1 sebelum dilakukan proses clustering menggunakan K-Means yang dibagi menjadi tiga cluster. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa cluster pertama memperoleh peringkat tertinggi dengan karakteristik IPK dan presensi tinggi serta UKT sedang, kemudian diikuti cluster kedua dan ketiga dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi metode K-Means dan SAW mampu menghasilkan sistem seleksi beasiswa yang lebih tepat, transparan, dan berbasis data sehingga membantu institusi pendidikan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat (Peling et al., 2024).
3. Jurnal Ketiga berjudul “Pendidikan untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Peluang Belajar Siswa di Tengah Kesenjangan Ekonomi” yang dimuat dalam Al Ikhlas. Jurnal ini menguraikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menelaah keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran dalam mewujudkan kesetaraan peluang belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam akses pendidikan, terutama di wilayah 3T, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif seperti Program Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penguatan kompetensi guru dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas upaya pemerataan pendidikan dapat dilihat dari peningkatan akses belajar, distribusi sarana dan prasarana yang lebih merata, serta terbukanya kesempatan belajar yang lebih luas bagi peserta didik dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Dengan demikian, pendidikan yang inklusif dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rosada & Khasanah, 2025).
4. Jurnal Keempat yang berjudul “Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia” Jurnal ini menjelaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai bentuk bantuan pendidikan pemerintah bertujuan mewujudkan akses pendidikan tinggi yang adil dan merata bagi masyarakat kurang mampu. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik pendistribusian masih terdapat berbagai ketidakadilan seperti manipulasi data, nepotisme, serta ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan analisis teori keadilan dari John Rawls, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan kesempatan, dan transparansi dalam distribusi bantuan pendidikan (Khairunnisa et al., 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian KIP-K di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Rawls karena masih ditemukan mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi namun tetap menerima bantuan, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya. Selain itu, penelitian juga menyoroti adanya keterlambatan pencairan dana serta kurangnya survei lapangan yang akurat dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program

beasiswa tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, transparansi seleksi, serta pengawasan penggunaan dana agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

5. Dalam jurnal berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia”, dijelaskan bahwa kebijakan KIP-K Aspirasi merupakan instrumen negara untuk menjamin hak atas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini secara normatif telah sejalan dengan amanat konstitusi dan kebijakan pendidikan nasional, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian tersebut menyoroti bahwa efektivitas kebijakan belum optimal karena terdapat kendala pada aspek transparansi mekanisme seleksi, ketepatan sasaran penerima, serta kelancaran pencairan dana. Selain itu, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme KIP-K Aspirasi menyebabkan munculnya persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, dan potensi politisasi dalam proses rekomendasi jalur aspirasi. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa faktor pendukung kebijakan meliputi landasan konstitusional yang kuat, dukungan anggaran negara, serta peran perguruan tinggi dalam proses verifikasi dan penyaluran bantuan. Sementara itu, faktor penghambat mencakup lemahnya pengawasan, perbedaan standar verifikasi antar perguruan tinggi, serta birokrasi yang berbelit dalam pencairan dana. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, standarisasi mekanisme seleksi, dan penguatan sistem pengawasan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. (Raihan & Fattah, n.d.)

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang kami gunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang menggambarkan keadaan aktual dari objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan ketika penelitian ini dilakukan (Septiani et al., 2022). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNIMED tentang analisis keadilan distribusi beasiswa KIP kuliah oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip keadilan sosial pancasila. Adapun Teknik pengumpulan data yang kami lakukan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Pratiwi, 2017). Observasi dilakukan saat peneliti mengamati sumber yang sedang memberikan informasi, dimana peneliti langsung memberitahu kepada sumber bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.
2. Wawancara. Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu (Pratiwi, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan untuk mendapatkan informasi terkait pandangan mereka terhadap analisis keadilan distribusi beasiswa KIP kuliah oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip keadilan sosial pancasila.



Gambar 1. Wawancara dengan Narasumber

3. Dokumentasi. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Pratiwi, 2017). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar, dan karya-karya dari seseorang yang membuat penelitian ini dapat dipercaya datanya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian yang ingin dilakukan. Berdasarkan lokasi penelitian yang akan kami teliti, maka kami menentukan bahwa kami melakukan penelitian secara luring dan terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Kami akan melakukan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Dalam penelitian yang akan kami lakukan ini, yang menjadi subjek penelitiannya adalah beberapa mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan yang terdiri dari lima responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melaksanakan studi di Universitas Negeri Medan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan berada di Jalan Willem Iskander/Pasar V 20221 Medan, Sumatera Utara.

Reduksi Data

Tabel 1.

No	Nama Responden	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Alya Rizki Amanda Manik (Mahasiswi PPKn C 2024)	Apakah pernah Anda melihat atau mengetahui adanya mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetapi tetap mendapatkan KIP Kuliah? Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut?	Ya, saya pernah mendengar kasus seperti itu. Menurut saya ada beberapa kemungkinan alasan mengapa mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi masih mendapatkan KIP Kuliah: Manipulasi data, beberapa mahasiswa mungkin memanipulasi data ekonomi keluarga mereka untuk mendapatkan KIP Kuliah. Kurangnya pengawasan, pengawasan terhadap penggunaan KIP Kuliah mungkin tidak efektif, sehingga beberapa mahasiswa yang tidak berhak masih bisa mendapatkannya. Pendapat saya tentang hal ini adalah bahwa KIP Kuliah seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yaitu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Jika ada mahasiswa yang mampu secara ekonomi tetapi masih mendapatkan KIP Kuliah, maka itu adalah kesalahan sistem dan perlu diperbaiki. Karena kita tahu bahwa tujuan dari KIP Kuliah ini adalah untuk membantu mahasiswa kurang mampu, bukan untuk diberikan kepada mereka yang sudah mampu. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan sistem seleksi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa KIP Kuliah diberikan kepada yang berhak.
2	Eklesia Br Milala		Kalo menurut saya ya, kita tidak bisa dengan cepat mengatakan bahwa sebenarnya dia mampu mengapa dapat kip, hanya karna kita melihat

	(Mahasiswi PPKn C 2024)		dari style nya atau kita sering melihat dia jalan jalan berfoto di tempat mewah, terkadang orang orang yang seperti itu namanya juga masyarakat kurang mampu jadi ketika melihat kota mereka sering berfoto-foto dan mencoba style baru dari situ kita melihat ah pasti dia mampu, padahal kan mungkin saja sebenarnya orang tua di kampung dalam kesusahan. Tapi ada beberapa juga yang tidak tepat sasaran.
3	Hotmauli Marselina Marpaung (Mahasiswi PPKn C 2024)		Sejauh ini saya belum melihat mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun mendapatkan bantuan KIPk kuliah, secara khusus di kampus, karena jika saya lihat teman saya yang mendapatkan nya yang memang layak-layak saja.
4	Priska Jelfina Waruwu (Mahasiswi Geografi D 2025)		Ya, saya pernah mendengar dan mengetahui ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup mampu tetapi tetap mendapatkan KIP Kuliah. Menurut saya hal ini kurang adil, karena program KIP Kuliah seharusnya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Jika bantuan tersebut diberikan kepada orang yang sebenarnya mampu, maka mahasiswa lain yang lebih membutuhkan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
5	Aisyah Nanda Putri (Mahasiswi PPKn D 2024)		Saya pernah lihat atau dengar ada mahasiswa yang sebenarnya kondisi ekonominya cukup, tapi tetap dapat KIP Kuliah. Menurut saya itu agak kurang adil sih, karena bantuan ini kan seharusnya untuk mahasiswa yang benar-benar butuh. Kadang jadi kepikiran juga, mungkin ada teman lain yang lebih membutuhkan tapi malah nggak dapat.
6	Alya Rizki Amanda Manik (Mahasiswi PPKn C 2024)		Saya percaya bahwa dukungan KIP Kuliah yang telah saya terima sangat bermanfaat, bahkan bisa dikatakan telah menjadi dasar penting bagi saya untuk melanjutkan studi sampai sekarang. Namun, ketika ditanya apakah itu sudah mencukupi untuk semua kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari, jawabannya cukup untuk kebutuhan dasar dan utama, tetapi tetap memerlukan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan masih ada beberapa kekurangan.
7	Eklesia Br Milala (Mahasiswa PPKn C 2024)		Kalo di bilang cukup pastinya belum karna kan melihat dari mahal nya kebutuhan yang ada banyaknya pengeluaran dalam mengerjakan tugas kuliah di tambah lagi setiap tahunnya bayar uang kos dan masih banyak lagi tapi walaupun begitu dengan adanya kip ini sangat sangat membantu saya dalam menempuh pendidikan jika kip ini tidak ada mungkin saya tidak akan bisa menempuh pendidikan dan saya bersyukur pemerintah memberi saya kip ini.
8	Hotmauli Marselina Marpaung (Mahasiswi PPKn C 2024)	Apakah bantuan KIP Kuliah yang Anda terima sudah cukup membantu kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari selama kuliah? Jelaskan.	Menurut saya membantu sekali karena memang harus dipergunakan selayak nya untuk tujuan kuliah dan kehidupan sehari-hari, namun terkadang ketika dikira-kira kan memang masih kurang, tapi itu udah membantu orang tua agar tidak terlalu berat.
9	Priska Jelfina Waruwu (Mahasiswi Geografi D 2025)		Bantuan KIP Kuliah yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan selama kuliah. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya pendidikan, membeli buku, serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan atau tempat tinggal. Dengan adanya bantuan ini, mahasiswa dapat lebih fokus belajar tanpa terlalu terbebani oleh masalah biaya. Walaupun begitu, terkadang bantuan tersebut masih perlu dikelola dengan baik karena kebutuhan setiap mahasiswa berbeda-beda.
10	Aisyah Nanda Putri (Mahasiswi PPKn D 2024)		KIP Kuliah ini sangat membantu. Soalnya biaya kuliah jadi ditanggung, jadi bisa lebih fokus belajar tanpa terlalu kepikiran biaya. Bantuan biaya hidupnya juga lumayan membantu buat kebutuhan sehari-hari seperti makan, transport, atau beli keperluan kuliah. Walaupun kadang masih harus hemat- hemat, tapi tetap sangat membantu.
11	Alya Rizki Amanda Manik (Mahasiswi)	Menurut Anda, apakah program KIP Kuliah sudah mencerminkan nilai	Menurut saya, program KIP Kuliah belum sepenuhnya mencerminkan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh mahasiswa di Indonesia, karena masih ada beberapa masalah, seperti ada kemungkinan bahwa KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang tidak

	PPKn C 2024)	Keadilan Sosial bagi seluruh mahasiswa di Indonesia? Mengapa?	berhak, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan proses seleksi KIP Kuliah masih belum transparan, sehingga ada kemungkinan bahwa keputusan tidak dibuat berdasarkan kebutuhan mahasiswa.
12	Eklesia Br Milala (Mahasiswi PPKn C 2024)		Sudah tapi hanya saja kadang ada yang salah sasaran
13	Hotmauli Marselina Marpaung (Mahasiswi PPKn C 2024)		Menurut saya, program KIP Kuliah ini sudah berupaya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun terkadang pada praktik meratakan KIPk bagi mahasiswa itu yang kurang. contoh nya disekitar kita, teman kita yang sudah kita tahu dia kurang mampu, bahkan untuk kuliah saja dia harus bekerja, atau menumpang di rumah saudara nya untuk mengurangi pengeluaran kost. ini lah yang sering terjadi di lingkungan KIPK kuliah ini, namun saya sangat bersyukur bisa mendapatkan bantuan KIPk kuliah ini dan berharap pada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang lebih adil untuk setiap anak kurang mampu yang mau melanjutkan jenjang perkuliahan namun terhalang pada finansial. Jadi kesimpulan nya program KIP Kuliah sudah mencerminkan upaya menuju keadilan sosial, namun masih perlu peningkatan dalam hal transparansi, pemerataan.
14	Priska Jelfina Waruwu (Mahasiswi Geografi D 2025)		Menurut saya, program KIP Kuliah sudah berusaha mencerminkan nilai keadilan sosial bagi mahasiswa di Indonesia, karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan, seperti adanya penerima yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, program ini masih perlu diperbaiki agar benar-benar adil bagi semua mahasiswa
15	Aisyah Nanda Putri (Mahasiswi PPKn D 2024)		Menurut saya sih program ini sebenarnya sudah mengarah ke keadilan sosial, karena tujuannya memang buat bantu mahasiswa yang kurang mampu supaya tetap bisa kuliah. Tapi kalau dilihat dari kenyataan di lapangan, masih belum sepenuhnya adil juga, karena kadang ada yang sebenarnya mampu tapi tetap dapat bantuan.
16	Alya Rizki Amanda Manik (Mahasiswi PPKn C 2024)		Menurut saya, pemerintah perlu memperbaiki beberapa hal agar distribusi KIP Kuliah lebih adil dan tepat sasaran, seperti meningkatkan transparansi dan objektivitas proses seleksi KIP Kuliah dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan KIP Kuliah untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar.
17	Eklesia Br Milala (Mahasiswi PPKn C 2024)	Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar distribusi KIP Kuliah lebih adil dan tepat sasaran? Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah agar distribusi KIP Kuliah lebih adil dan tepat sasaran?	Benar benar memperhatikan berkas yang di upload dan melakukan survey dengan sungguh sungguh, seperti bertanya kepada masyarakat sekitar apakah benar benar dia orang kurang mampu.
18	Hotmauli Marselina Marpaung (Mahasiswi PPKn C 2024)		Mengeluarkan kebijakan yang dapat mensurvei seseorang itu layak atau tidak, karena ada juga yang memanipulasi data nya, seperti berfoto di rumah orang lain yang kurang mampu, mengurangi pendapatan orang tua nya dll. nah jika ada survei, otomatis akan ada orang yang memastikan keadaan seseorang tersebut
19	Priska Jelfina Waruwu (Mahasiswi Geografi D 2025)		Menurut saya, pemerintah perlu memperbaiki sistem seleksi dan pendataan calon penerima KIP Kuliah. Proses verifikasi kondisi ekonomi calon penerima perlu dilakukan dengan lebih teliti, misalnya melalui pengecekan data yang lebih akurat atau survei langsung ke lapangan. Dengan cara tersebut, bantuan KIP Kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
20	Aisyah Nanda Putri (Mahasiswi PPKn D 2024)		Menurut saya pemerintah perlu lebih teliti lagi dalam mengecek kondisi ekonomi calon penerima. Datanya juga mungkin perlu diperbarui secara berkala, jadi bisa kelihatan mana yang benar-benar butuh bantuan dan mana yang tidak. Dengan begitu, bantuan KIP Kuliah bisa lebih tepat sasaran
21	Alya Rizki Amanda	Jika Anda diminta memberi saran	Jika saya diminta memberi saran kepada pemerintah, saya akan mengusulkan beberapa hal, seperti: Membuat sistem seleksi KIP

	Manik (Mahasiswi PPKn C 2024)	kepada pemerintah mengenai program KIP Kuliah, apa usulan yang akan Anda berikan agar program ini benar-benar mencerminkan keadilan sosial?	Kuliah yang lebih transparan dan objektif, dengan menggunakan data yang akurat. Meningkatkan jumlah dana KIP Kuliah untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa yang membutuhkan.
22	Eklesia Br Milala (Mahasiswi PPKn C 2024)		Menambahi kuotanya.
23	Hotmauli Marselina Marpaung (Mahasiswi PPKn C 2024)		Pertama, memperbaiki sistem pendataan dan seleksi penerima . Pemerintah perlu memastikan bahwa data ekonomi calon penerima benar-benar akurat, misalnya dengan melakukan verifikasi langsung atau survei langsung. Kedua, menambah kuota dan pemerataan penerima KIP Kuliah di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil atau wilayah yang tingkat ekonominya masih rendah.
24	Priska Jelfina Waruwu (Mahasiswi Geografi D 2025)		Jika saya diminta memberi saran kepada pemerintah, saya menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses penentuan penerima KIP Kuliah. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbarui data ekonomi masyarakat secara berkala dan bekerja sama dengan pihak kampus agar proses seleksi lebih akurat. Dengan demikian, program KIP Kuliah dapat benar-benar membantu mahasiswa yang kurang mampu dan mencerminkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan.
25	Aisyah Nanda Putri (Mahasiswi PPKn D 2024)		Saran saya, program ini tetap dilanjutkan tapi sistem seleksinya dibuat lebih ketat dan lebih transparan, supaya bantuan ini benar-benar sampai ke mahasiswa yang memang membutuhkan.

Display Data

Pandangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, diperoleh beberapa temuan penting terkait pelaksanaan distribusi beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa program KIP Kuliah memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Bantuan tersebut dinilai mampu mengurangi beban biaya pendidikan, baik yang berkaitan dengan pembayaran uang kuliah maupun kebutuhan hidup selama menjalani perkuliahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran beasiswa tersebut. Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa proses seleksi penerima beasiswa belum sepenuhnya berjalan secara transparan. Hal ini terlihat dari adanya mahasiswa yang secara ekonomi dinilai cukup mampu tetapi tetap memperoleh bantuan KIP Kuliah, sementara terdapat mahasiswa lain yang dianggap lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, mahasiswa juga mengungkapkan adanya beberapa hambatan administratif, seperti keterlambatan dalam pencairan dana bantuan serta kurangnya informasi yang jelas terkait prosedur pendaftaran dan persyaratan penerima beasiswa. Kondisi ini menyebabkan sebagian mahasiswa merasa belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai mekanisme penentuan penerima bantuan. Walaupun masih terdapat beberapa permasalahan, para mahasiswa secara umum menilai bahwa program KIP Kuliah merupakan kebijakan yang sangat penting dalam mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Verifikasi Data

KIP Kuliah memiliki peran yang penting dalam membantu meringankan beban biaya pendidikan di perguruan tinggi. Bantuan yang diberikan melalui program tersebut dinilai mampu mendukung keberlanjutan pendidikan bagi pihak yang memiliki keterbatasan

ekonomi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun, ada beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan distribusi beasiswa KIP Kuliah. Salah satu temuan yang muncul adalah terkait dengan proses seleksi penerima bantuan yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Hal ini terlihat dari adanya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, di mana terdapat penerima yang secara ekonomi dinilai cukup mampu, sementara pihak yang dinilai lebih membutuhkan justru tidak memperoleh bantuan tersebut. Kemudian, adanya kendala administratif dalam proses penyaluran bantuan, seperti keterlambatan pencairan dana serta kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pendaftaran dan mekanisme penentuan penerima beasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar distribusi bantuan dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Program KIP Kuliah memiliki kontribusi positif dalam memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Meskipun demikian, agar pelaksanaan program tersebut benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam proses penyaluran bantuan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terhadap lima responden mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, pembahasan penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mekanisme penentuan penerima KIP Kuliah, kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan kesempatan pendidikan, serta potensi ketimpangan dan diskriminasi dalam proses distribusi beasiswa.

Mekanisme Penentuan Penerima KIP Kuliah Ditinjau dari Prinsip Keadilan Sosial Pancasila

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta mencerminkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa mekanisme penentuan penerima KIP Kuliah sudah berusaha mengarah pada prinsip keadilan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kekurangan. Beberapa responden menyampaikan bahwa proses seleksi terkadang belum sepenuhnya transparan dan masih terdapat kemungkinan kesalahan dalam menentukan penerima bantuan. Responden Alya Rizki Amanda Manik menyatakan bahwa masih terdapat kemungkinan mahasiswa yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetap mendapatkan bantuan KIP Kuliah karena adanya manipulasi data atau kurangnya pengawasan dalam proses seleksi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penentuan penerima masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Apabila kondisi ini terjadi, maka tujuan utama program untuk membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dapat menjadi tidak optimal.

Pendapat tersebut juga didukung oleh responden lain yang menyatakan bahwa proses verifikasi data ekonomi calon penerima perlu dilakukan dengan lebih teliti. Verifikasi yang kurang akurat berpotensi menyebabkan bantuan tidak diberikan kepada pihak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, mekanisme seleksi seharusnya tidak hanya

bergantung pada dokumen administrasi, tetapi juga memerlukan pengecekan kondisi ekonomi secara langsung melalui survei lapangan. Namun demikian, beberapa responden juga menyampaikan bahwa tidak semua mahasiswa yang terlihat mampu secara ekonomi benar-benar berasal dari keluarga yang mampu. Dalam beberapa kasus, penilaian terhadap kondisi ekonomi seseorang sering kali didasarkan pada penampilan atau gaya hidup yang terlihat di lingkungan kampus maupun media sosial. Padahal, kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya dapat berbeda dengan apa yang tampak di permukaan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kelayakan penerima bantuan harus dilakukan secara objektif berdasarkan data yang valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penentuan penerima KIP Kuliah secara umum telah berupaya menerapkan prinsip keadilan sosial, namun masih membutuhkan peningkatan dalam aspek transparansi, pengawasan, dan akurasi data agar proses seleksi benar-benar mencerminkan nilai keadilan.

Kesesuaian Kriteria Penerima KIP Kuliah dengan Prinsip Pemerataan Kesempatan Pendidikan

KIP Kuliah dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kriteria penerima bantuan seharusnya didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga serta potensi akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, para responden pada umumnya menyatakan bahwa bantuan KIP Kuliah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari selama masa perkuliahan. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya kuliah, membeli buku, memenuhi kebutuhan makan, serta membantu biaya tempat tinggal seperti kos. Responden Eklesia Br Milala menyampaikan bahwa walaupun bantuan KIP Kuliah belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan selama kuliah, namun program tersebut sangat membantu mahasiswa untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan. Tanpa adanya bantuan tersebut, sebagian mahasiswa mungkin akan mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan mereka. Hal yang sama juga disampaikan oleh responden lainnya yang menyatakan bahwa KIP Kuliah dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga mahasiswa dapat lebih fokus pada kegiatan akademik. Bantuan biaya hidup yang diberikan juga cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar selama menjalani perkuliahan. Namun demikian, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara kriteria penerima dengan kondisi nyata di lapangan. Beberapa mahasiswa yang sebenarnya berasal dari keluarga kurang mampu terkadang tidak mendapatkan bantuan, sementara ada juga mahasiswa yang relatif lebih mampu namun berhasil memperoleh beasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pemerataan kesempatan pendidikan belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan dapat menyebabkan mahasiswa yang benar-benar membutuhkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh bantuan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi kondisi ekonomi calon penerima agar bantuan KIP Kuliah benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang paling membutuhkan. Dengan demikian, tujuan program untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif.

Potensi Ketimpangan dan Diskriminasi dalam Distribusi KIP Kuliah

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa program KIP Kuliah pada dasarnya telah berusaha mencerminkan nilai keadilan sosial. Namun, dalam implementasinya masih terdapat potensi ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses distribusi bantuan. Salah satu bentuk ketimpangan yang sering disoroti oleh responden adalah adanya kemungkinan manipulasi data ekonomi oleh calon

penerima bantuan. Beberapa mahasiswa dapat saja mengurangi atau mengubah informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga mereka agar terlihat lebih layak menerima bantuan. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam proses seleksi juga dapat menyebabkan distribusi bantuan menjadi kurang tepat sasaran. Apabila sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penentuan penerima bantuan akan semakin besar. Responden juga menyampaikan bahwa jumlah kuota penerima KIP Kuliah yang terbatas dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan. Banyak mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan, namun tidak dapat memperoleh beasiswa karena keterbatasan jumlah penerima. Dalam perspektif keadilan sosial Pancasila, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa. Prinsip keadilan sosial tidak hanya menekankan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pemerataan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Oleh karena itu, beberapa responden memberikan saran agar pemerintah meningkatkan transparansi dalam proses seleksi, memperketat verifikasi data ekonomi calon penerima, serta menambah kuota penerima KIP Kuliah agar lebih banyak mahasiswa yang dapat memperoleh bantuan pendidikan. Apabila langkah-langkah tersebut dapat diterapkan secara konsisten, maka program KIP Kuliah diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh mahasiswa di Indonesia.

KESIMPULAN

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Secara konseptual, program ini telah sejalan dengan prinsip pemerataan kesempatan dan keadilan distributif, terutama dalam memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, berdasarkan analisis yang dilakukan, implementasi KIP-K di tingkat daerah dan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi, ketidaktepatan sasaran penerima, serta keterlambatan pencairan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial secara substantif. Selain itu, masih ditemukan adanya potensi ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa, yang dipengaruhi oleh lemahnya verifikasi data, perbedaan standar antar lembaga, serta kemungkinan praktik nepotisme dan politisasi kebijakan. Dimana mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. memiliki tujuan yang mulia, efektivitasnya sebagai alat pemerataan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mampu menjadi solusi dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIP-K, pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan distribusi beasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang terbuka terkait kuota, kriteria seleksi, serta hasil penetapan penerima, sehingga dapat diakses oleh publik secara jelas dan mudah. Selain itu, perlu adanya standardisasi mekanisme verifikasi data ekonomi berbasis indikator yang terukur dan terintegrasi secara nasional guna meminimalkan kesalahan sasaran. Penguatan sistem pengawasan juga penting untuk mencegah praktik penyimpangan seperti manipulasi data dan nepotisme. Di sisi lain, pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan literasi kebijakan di kalangan mahasiswa agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai calon maupun penerima KIP-K. Pendampingan dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan

bantuan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tepat guna. Selain itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci dan tegas untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan serta memperkuat kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, R., Oktavian, D., & Syahputra, A. R. (2025a). *Analisis Efektivitas Kebijakan Penyaluran Beasiswa KIPK Aspirasi di Indonesia*. 4(1), 799–808.
- Khairunnisa, N. J., Ahmad, A. N., Raihan, M., Azri, A., & Fattah, A. A. (2024). Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP- K) di Indonesia Pendahuluan kemajuan sebuah negara. Pendidikan dapat mempengaruhi semua. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 13(1).
- Peling, I. B. A., Ariawan, M. P. A., & Subiksa, G. B. (2024). Analisis Cluster Mahasiswa Penerima Beasiswa dengan Metode K-means dan SAW Analysis Cluster Scholarship Recipient Student Using K - means and SAW. *Jurnal Sistem Informasi*, 13, 1334–1343.
- Prasetyo, A., Istiqomah, R. S., Rifai, M., Abdul, M., & Azis, D. M. (2022). Analisis Konsep Model Kepribadian Mahasiswa Penerima KIPKuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Academica*, 6(1).
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 202–224.
- Raihan, M., & Fattah, A. A. (n.d.). *Prinsip Keadilan dalam Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Indonesia Pendahuluan kemajuan sebuah negara . Pendidikan dapat mempengaruhi semua*. 13(1).
- Rosada, S., & Khasanah, N. (2025). Pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam peluang belajar siswa di tengah kesenjangan ekonomi. *Al Ikhlas Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.64677/ppai.v2i2.208>
- Rusyadi, D. A., Dwi, N., Rinjanik, A., Hasanah, U., Anggianto, Y., & Fuad, L. (2025). Efektivitas Distribusi Zakat Untuk Beasiswa Pena Bangsa di YDSF Surabaya. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (JUMEA)*, 2(2), 94–102.
- Septiani, R. A. D., Wardana, D., & Widjojoko. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137.
- Situmeang, D. A., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Hutajulu, A., Harita, R., Sihombing, A. A., Helida, N., & Medan, N. (2025). Kebutuhan Dasar Masyarakat (Studi Kasus: Program Kip-K Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Unimed). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(April), 279–287.
- Wayes, G. (2023). Suatu Kajian Teologis Mikha 6: 8 Terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sebagai Upaya Pemerintah Mengurangi Gidion Wayes. *Jurnal Penggerak*, 6(1), 171–204. <https://doi.org/10.62042/jtp.v6i1.82>